

TESIS

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG SINERGITAS
MEDIA SOSIAL APARATUR NEGARA
DI KEMENKO POLHUKAM RI**

Disusun oleh :

**NAMA : MUHAMAD AGUS SUPRIYANTO
NPM : 1861001068
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)**



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

2020

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

JUDUL TESIS : FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG SINERGITAS MEDIA SOSIAL APARATUR NEGARA DI KEMENKO POLHUKAM RI

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Tesis,



(Dr. R. Luki Karunia, SE., Ak., MA)

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : MUHAMAD AGUS SUPRIYANTO
NPM : 1861001068
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
JUDUL TUGAS AKHIR/ TESIS : FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
TENTANG SINERGITAS MEDIA SOSIAL
APARATUR NEGARA DI KEMENKO
POLHUKAM RI

Telah mempertahankan tesis di hadapan panitia penguji tesis
Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Desember 2020
Pukul : 09.00 – 10.00 WIB

J A K A R T A T E L A H D I N Y A T A K A N L U L U S

PANITIA PENGUJI TESIS :



Ketua Sidang : Dr. Ridwan Rajab, M.Si :
Sekretaris : Dr. Bambang Riyanto, M. Pd :
Pembahas : Dr. Asropi, M.Si :
Pembimbing : Dr. R. Luki Karunia, SE., Ak., M.A. :



LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Muhamad Agus Supriyanto
Nomor Pokok Mahasiswa : 1861001068
Program studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang telah saya susun ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tesis ini merupakan hasil Plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada dipaksakan.

Jakarta, Desember 2020



M. Agus Supriyanto

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat dan karunia-Nya, telah memberikan kesehatan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya.

Adapun judul tesis Saya adalah "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Implementasi Kebijakan Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI", dimana tesis ini juga merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP) pada Politeknik STIA-LAN Jakarta. Tesis ini telah melalui beberapa diskusi dan mendapatkan masukan serta koreksi dari dosen pembimbing, teman-teman jurusan Kebijakan Pembangunan maupun pelaku yang terlibat dalam penelitian ini, dengan harapan tesis ini dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Akan tetapi, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis. Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada bapak **Dr. R. Luki Karunia, SE., Ak., MA.**, yang telah membimbing penulis dengan kesungguhan hati dan kesabaran sampai terselesaiannya tesis ini.

Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada :

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., selaku Direktur Politeknik STIA-LAN Jakarta.
2. Bapak Drs. Muztahidin, M.M. selaku Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Masa.
3. Bapak Pontjo Wasono, selaku Kabid Intelijen, Bapak Gan Gan M. Rizal, M.AP., selaku Kabag Hubungan Kelembagaan dan para key informan lainnya.
4. Para Dosen, staf yang telah banyak memberikan ilmu dan dukungan dan Civitas Politeknik STIA-LAN Jakarta, yang tidak dapat satu

persatu Saya sebutkan yang mendukung Penulis selama menimba ilmu.

5. Kepada Istri Tercinta Noviyanti, dan anak kami Khanza Kanaya Arizty dan Al Khalifi Zikri Hadi, serta Bapak Saya Supardi dan Ibu Saya Siti Mutomah yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, serta seluruh saudara yang tidak dapat satu persatu Saya sebutkan.
6. Rekan-rekan ASN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI terutama Gilang Leo Akbar, M.AP., serta yang tidak dapat Saya sebutkan satu persatu atas dukungannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga tesis ini dapat memberikan setitik pengetahuan dan khasanah dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara.

Hormat Saya,

M. Agus Supriyanto

ABSTRAK

M. AGUS SUPRIYANTO, 1861001068

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG SINERGITAS MEDIA SOSIAL APARATUR NEGARA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN RI

136 Halaman, 5 Bab, 2 Tabel, 17 Gambar, 6 Lampiran

Daftar Pustaka : 26 Buku, 8 Peraturan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada implementasi kebijakan sinergitas media sosial aparatur Negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI dengan memperhatikan aspek-aspek dalam implementasi kebijakan menurut George Edward III yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Metode penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang menguraikan dan menafsirkan permasalahan secara lebih mendalam melalui teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan pada 8 (delapan) orang *key informant*, telaah dokumen difokuskan pada dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan sinergitas media sosial aparatur Negara, baik peraturan yang berkaitan dengan media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dari aspek-aspek yang menjadi penelitian yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi masih belum berjalan secara optimal. Masih adanya kendala yang terjadi pada implementasi kebijakan sinergitas media sosial media sosial aparatur negara di Kemenko Polhukam.

Disarankan untuk aspek **komunikasi** agar sosialisasi terus dilaksanakan supaya aparatur negara bisa mengetahui pentingnya peranan mereka dalam mengkonter informasi negative/hoax; aspek **sumberdaya** berupa perlunya dukungan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran bagi tim Siman; aspek **disposisi** berupa perlu adanya aturan yang tegas terkait keharusan aparatur negara dalam memberikan konter terhadap berita negatif; **struktur birokrasi** berupa perlunya menggunakan teknologi virtual tidak harus rapat koordinasi secara fisik guna mempercepat pengambilan keputusan.

Kata Kunci : Implementasi, komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi

ABSTRAC

M. AGUS SUPRIYANTO, 1861001068

DETERMINING FACTORS ON THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL MEDIA SYNERGY OF STATE APPARATUS AT THE COORDINATING MINISTRY OF POLITICAL, LEGAL AND SECURITY AFFAIRS OF THE REPUBLIC INDONESIA

136 Page, 5 Chapter, 2 Tables, 17 Pictures, 6 Attachments

Bibliography : 26 Books, 8 Rules

This research was conducted to determine factors on the policy implementation of social media synergy of state apparatus at the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs of the Republik of The Republic Indonesia by paying attention to aspects in policy implementation according to Georfe Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure.

The research methodology is carried out by qualitative research methods that describe and interpret the problem in more depth through data collection techniques with interview methods and document review. Interviews were conducted on 8 (eight) key informants, document review was focused on documents related to the implementation of social media synergy among state apparatus, both regulations related to social media.

The results show that in general the authors can conclude that from the aspects that become research, namely communication, resources, dispositions and bureaucratic structures are still not running optimally. There are still problems that occur in the policy implementation of social media synergy of state apparatus at the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs.

Suggested for the for the **communication** aspect to continue socialization so that state apparatus can find out the importance of their role in counter negative information/ hoaxes; **resource** aspects in the form of the need for support for facilities and infrastructure as well as budget support for the SIMAN team; **the disposition** aspect in the form of the need for strict rules regarding the obligation of the state appuratus to provide the counter for negative news; **bureaucratic structures** in the form of the need to use virtual technology do not have to physically coordinate meetings to speed up decision making.

Keywords : Implementation, communication, resources, disposition, bureaucratic structure

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Fokus Permasalahan	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	11
BAB II KERANGKA TEORI	12
A. Tinjauan Teori dan Konsep Kunci	12
1. Kebijakan Publik	12
2. Implementasi Kebijakan	29
3. Kepmenko Polhukam tentang Tim SIMAN	55
4. Media Sosial	57

B.	Penelitian Terdahulu	66
C.	Konsep Kunci	67
D.	Model Berpikir	68
E.	Pertanyaan Penelitian	69
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		70
A.	Metode Penelitian	70
B.	Teknik Pengumpulan Data	71
C.	Prosedur Pengolahan Data dan Analisa Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN		81
A.	Gambaran Umum Kemenko Polhukam RI	81
B.	Gambaran Umum Tim Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara ..	83
C.	Analisis Hasil Penelitian	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		127
A.	Kesimpulan	127
B.	Saran	130
DAFTAR PUSTAKA		132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kategori Konten Hoax

Tabel 3.1. Daftar *Key Informan*

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Pengguna media sosial di Indonesia
- Gambar 1.2. Media sosial yang sering diakses
- Gambar 1.3 Narasi negatif di facebook
- Gambar 2.1. Agenda Setting Process
- Gambar 2.2. Kaitan Isu, Problem, dan Kebijakan
- Gambar 2.3 Model Berpikir
- Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kemenko Polhukam
- Gambar 4.2. Stuktur Tim Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara
- Gambar 4.3. Sosialisasi Siman di Kemenko Polhukam 4 April 2019
- Gambar 4.4. Sosialisasi Siman di Kemenko Polhukam 4 April 2019
- Gambar 4.5. Daftar hadir Sosialisasi Siman di Kemenko Polhukam
4 April 2019
- Gambar 4.6. Narasi Negatif di Facebook
- Gambar 4.7 Pelatihan SIMAN
- Gambar 4.8 Berita yang dipublis oleh Kemenko Polhukam
- Gambar 4.9. Ruangan Sekretariat Siman
- Gambar 4.10. ASN yang menshare berita yang dikeluarkan oleh Instansi
- Gambar 4.11. Rapat koordinasi SIMAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Penelitian
2. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian
3. Transkrip Wawancara
4. Surat Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Program Magister Politeknik STIA-LAN Jakarta
5. Surat Pemberitahuan Izin Melaksanakan Penelitian
6. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi mempercepat perubahan lingkungan global dan regional. Dunia seolah-olah tanpa batas, dimana dalam sekejap setiap peristiwa yang terjadi di suatu daerah maupun negara dapat diketahui oleh daerah ataupun negara di belahan dunia lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi juga berpengaruh terhadap kultur Birokrasi pemerintahan. Hal ini menuntut agar Birokrasi pemerintahan harus senantiasa menyesuaikan diri agar dapat mengikuti perkembangan dinamika tuntutan masyarakat.

Salah satu bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini dan berkembang cukup cepat yakni media sosial. Saat ini media sosial merupakan media komunikasi yang efektif, transparasi dan efisien serta memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Penggunaan media sosial sebagai jembatan untuk membantu proses peralihan masyarakat yang tradisional ke masyarakat yang modern, khususnya untuk mentransfer informasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kepada masyarakatnya. Sebaliknya masyarakat dapat menyampaikan informasi langsung kepada pemerintah tentang berbagai hal terkait dengan pelayanan yang diterima.

Munculnya media sosial di dunia dimulai dengan munculnya *Friendster* pada tahun 2002 yang merupakan aplikasi untuk membangun relasi pertemanan dunia maya dengan cakupan yang luas yakni seluruh dunia. Setelah munculnya *Friendster*, media sosial yang selanjutnya adalah *Linkedin* sebuah situs yang membagikan pengalaman mengenai dunia bisnis dan pekerjaan yang didirikan pada tahun yang sama. Selanjutnya pada tahun 2003 situs *MySpace* didirikan, berfokus pada orientasi music seseorang, *MySpace* menjadi situs jejaring yang dapat digunakan untuk bertukar pesan/chatting, mengunggah lagu/video dan menyediakan layanan pemasangan genre music khusus pada halaman profil.

Pada tahun 2004 muncullah *Flickr* yakni situs yang memberi ruang penggunaanya untuk mengunggah foto-foto dan video yang menarik dan dapat dibagikan kepada anggota di dalam situs tersebut. Masih pada tahun yang sama kemunculan *Facebook* sebagai media sosial yang memfasilitasi kita untuk bertukar pesan pribadi maupun grup baik gambar maupun video. Dalam *Facebook* kita juga dapat mengirimkan permintaan teman kepada seluruh pengguna situs tersebut di dunia.

Pada tahun 2006 muncul *Twitter*, situs tersebut merupakan jejaring sosial yang memampukan kita untuk mengikuti (*follow*) pengguna lain untuk dapat mengikuti postingan yang mereka buat. Pada tahun 2010 *Instagram* muncul sebagai situs jejaring sosial yang memberi

fasilitas untuk mengedit foto maupun video lalu mengunggahnya. Interaksi yang dibangun pada situs ini dapat berupa tombol suka (*like*), kolom komentar dan pengiriman pesan melalui *Direct Message* (DM).

Pada tahun 2011 muncul *Line*, berbeda dengan situs jejaring sosial yang lain, *Line* berfokus kepada pengguna aplikasi untuk saling bertukar pesan. Sistem penambahan pertemanan di *Line* dapat ditemukan dengan menggunakan *system add* menggunakan *username/id*. Pada tahun yang sama, *Snapchat* merupakan situs jejaring sosial yang memfasilitasi para pengguna untuk bertukar pesan dengan medium foto yang dapat diedit seperti memasukkan teks pesan dan menggunakan fitur efek pada foto. Kemudian muncul juga *Google+* yang merupakan situs dalam jaringan yang memiliki fitur-fitur didalamnya yang dapat digunakan untuk berinteraksi.

Kemudian di Indonesia media sosial mulai muncul pada tahun 2002 dengan hadirnya *Friendster* yang menjadi situs jejaring sosial yang *booming* dikalangan remaja pada saat itu sempat memposisikan Indonesia sebagai pengguna *Friendster* paling banyak ke 3 di dunia. *Friendster* digunakan penggunanya untuk berkenalan via dunia maya dan sebagai sarana untuk bertukar pesan. Setelah itu *Facebook* muncul pada tahun 2004 namun pamor *Facebook* di Indonesia naik daun pada tahun 2008 dan mulai menggeser *Friendster* sebagai sarana berkenalan via dunia maya. Fitur-fitur yang ditawarkan oleh

Facebook juga jauh lebih beragam seperti terdapat aplikasi games di dalamnya.

Pada tahun 2009 *Twitter* muncul sebagai situs jejaring sosial yang lebih simple dengan berfokus kepada penyajian *timeline* yang berisi status orang-orang yang kita ikuti disertai kolom komentar, kolom *retweet/like*. Situs ini juga dapat menjadi medium pertukaran pesan melalui *Direct Message* namun kita tidak bisa melihat pengguna yang *online*. Pada tahun ini juga muncul aplikasi *Whatsapp* namun pada saat itu belum diminati oleh masyarakat.

Selanjutnya pada tahun 2010 *Instagram* menjadi situs jejaring sosial di Indonesia yang diminati. Situs ini berfokus pada aktualisasi diri melalui foto dan video yang dapat diedit. Interaksi pada situs ini dapat diwujudkan melalui tombol *like*, berkomentar pada kolom komentar maupun mengirimkan pesan kepada pengguna lain. Pada tahun 2011 muncul *Line* yang digunakan sebagai medium untuk bertukar pesan sehari-hari, situs jejaring sosial ini berfokus kepada pertukaran pesan baik kelompok maupun perindividu dengan individu lainnya. Selain pertukaran pesan, *Line* juga dilengkapi dengan fitur *timeline* dan beberapa fitur yang lain seperti games. Para pengguna dapat saling menambahkan teman dengan menggunakan fitur *add friend*.

Snapchat juga muncul di Indonesia pada tahun yang sama yakni 2011, aplikasi ini diminati karena berbeda dengan aplikasi pertukaran pesan lainnya yang menggunakan teks, aplikasi ini berfokus kepada visual

baik foto maupun video yang disertai dengan efek-efek gambar, suara maupun teks yang dapat dimasukan di dalamnya. Para pengguna dapat menyeirkannya kepada khalayak publiknya yakni orang-orang yang mengikutinya atau mengirimnya secara pribadi kepada akun lainnya.

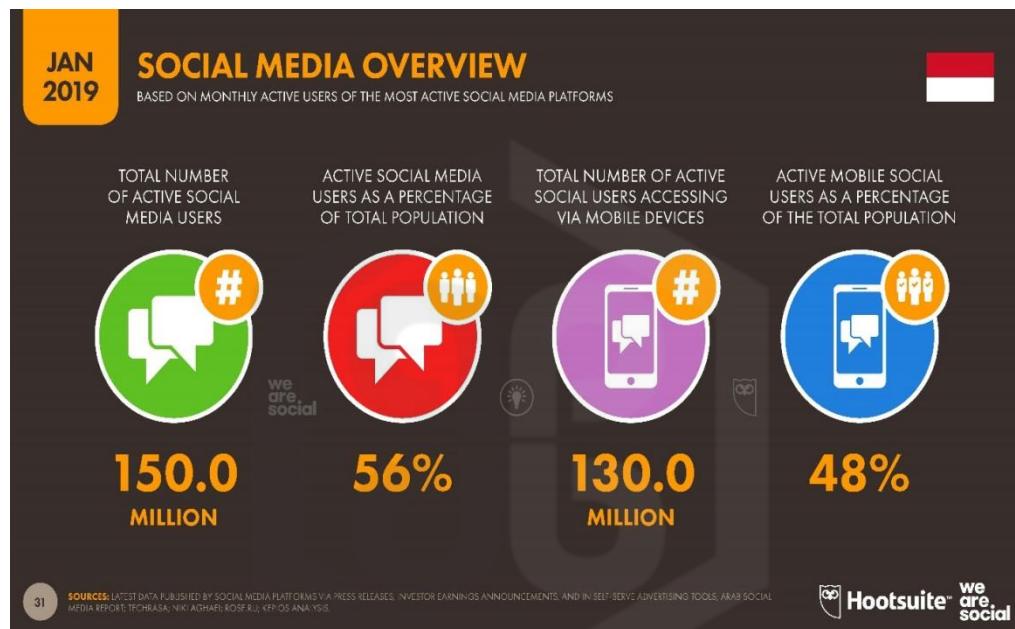
Dengan banyaknya media sosial yang ada sekarang, akses terhadap media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap orang. Itu dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan dan akses pengetahuan. Kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh industri seperti menghadirkan dunia dalam genggaman.

Media sosial mempunyai peranan strategis selain sebagai transformasi informasi, media sosial juga dapat menjadi sarana komunikasi antar sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyampaikan keluhan maupun menyampaikan berbagai aspirasi. Informasi-informasi terkait keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui kinerja pemerintah selama ini, sehingga media yang efektif guna penyampaian informasi terkait hal tersebut adalah melalui media sosial. Banyaknya media online dan media sosial yang menawarkan berbagai akses kemudahan akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijadikan sebagai wadah dalam memberikan masukan, kritik maupun saran dalam pembangunan. Disisi lain perlu adanya dorongan kepada semua lapisan masyarakat agar memiliki etika

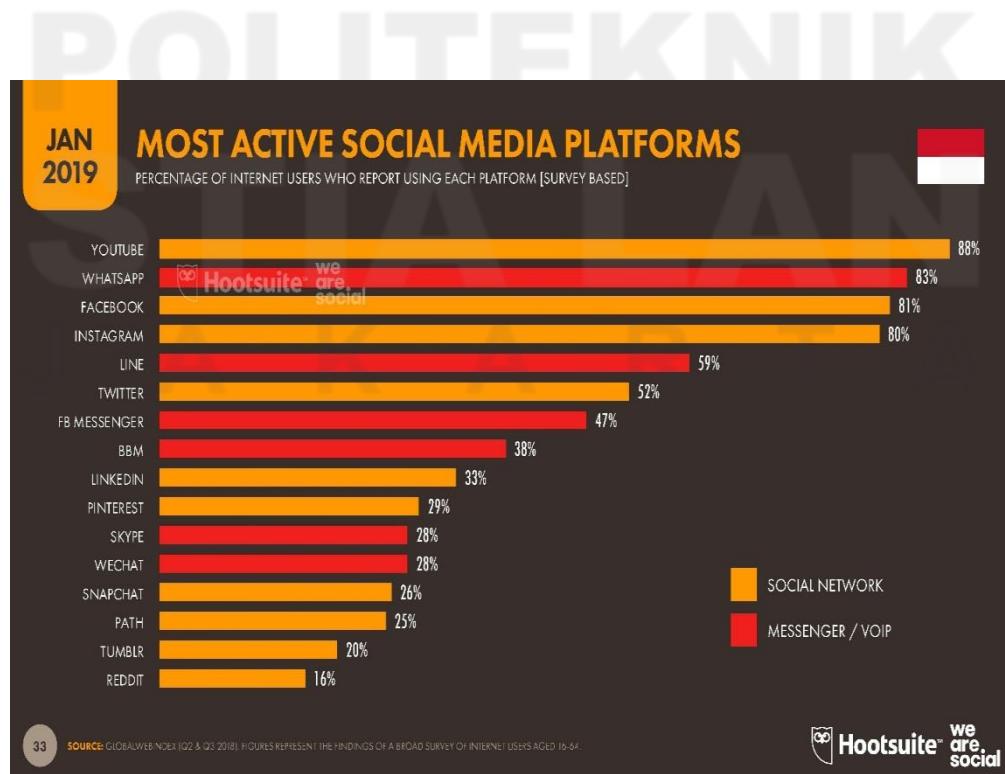
bagaimana memanfaatkan media sosial. Banyak sekali pengguna media sosial yang memanfaatkan media ini untuk hal-hal yang sifatnya negatif dan dapat merugikan semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Permasalahan yang timbul dari penggunaan media sosial saat ini adalah banyaknya *hoax* yang menyebar luas, bahkan orang terpelajar pun tidak bisa bedakan mana berita yang benar, *advertorial* dan *hoax*. Penyebaran tanpa dikoreksi maupun dipilah, pada akhirnya akan berdampak pada hukum dan informasi *hoax*-pun telah memecah belah publik sehingga hal ini bisa memberikan dampak *negative* terhadap masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *We Are Social* yang bekerjasama dengan *Hootsuite*, menyebutkan bahwa ada 150 juta orang Indonesia yang terbilang aktif di media sosial (medsoc). Laporan *We Are Social* mengungkapkan bahwa total populasi Indonesia mencapai 265,4 juta jiwa, sedangkan pengguna internetnya setengah dari populasi, yakni sebesar 150 juta. Bila dilihat dari jumlah pengguna internetnya, maka bisa dibilang seluruh pengguna internet di Indonesia sudah mengakses media sosial. *We Are Social* mengatakan 150 juta pengguna internet, 150 juta diantaranya pengguna aktif di medsos dengan penetrasi 56%.



Gambar 1.1. pengguna media sosial di Indonesia
 Sumber : <https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/>



Gambar 1.2. Media sosial yang sering diakses
 Sumber : <https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/>

Dinamika arus informasi terdapat penyaluran informasi dari pihak pembuat *hoax* yang bertujuan menimbulkan keresahan dan konflik di masyarakat, maka pemerintah dengan segenap aparatur negara wajib mengambil langkah-langkah yang perlu dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik guna menjamin stabilitas dan keamanan negara mencapai kepentingan nasional.

Kementerian Komunikasi dan Informasi RI menyampaikan bahwa selama tahun 2018-April 2019 total ada 1.731 *hoax*, *hoax* meningkat menjelang gelaran pencoblosan Pemilu pada 17 April 2019. Adapun kategori konten *hoax* yang berhasil diidentifikasi Kominfo sepanjang Agustus 2018-April 2019.

Kategori	Jumlah
Politik	620 <i>hoax</i>
Pemerintahan	210 <i>hoax</i>
Kesehatan	200 <i>hoax</i>
Fitnah	159 <i>hoax</i>
Kejahatan	113 <i>hoax</i>

Tabel 1.1. Kategori Konten Hoax
sumber: www.detiknews.com

Guna menindaklanjuti dinamika arus informasi yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional maka pemerintah membentuk Tim Sinergi Media Sosial Aparatur Negara melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tim Sinergi Media Sosial Aparatur Negara Tahun 2017, dirubah

dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tim Sinergi Media Sosial Aparatur Negara Tahun 2018 serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tim Sinergi Media Sosial Aparatur Negara Tahun 2019. Tim ini berada di Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan anggota gabungan dari berbagai instansi pemerintah.

Seiring dengan berjalannya kebijakan tersebut, dalam implementasinya masih terdapat kendala diantaranya :

1. Belum adanya regulasi yang mengatur aparatur Negara dalam menggunakan media sosial.
2. Kurangnya ketersediaan sumberdaya yang memadai baik berupa sumber daya anggaran, sarana dan prasarana bagi Tim Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN).
3. Kurangnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan *counter* terhadap *hoax* yang ada di Media Sosial padahal Kebijakan Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara sudah disosialisasikan di intern Kemenko Polhukam, ketika ada berita yang dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam, masih sedikit personel yang melakukan like/share berita tersebut.
4. Akun media sosial aparatur negara bersifat pribadi sehingga aparatur enggan/kurang dalam melakukan konter terhadap informasi negatif

dan bahkan ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang justru membuat narasi negatif.



Gambar 1.3. Narasi negatif di facebook

Dari permasalahan di atas, dapat digambarkan bahwa implementasi kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara (SIMAN) belum dapat berjalan dengan baik, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan tentang Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN) di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan adalah: bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan sinergitas media sosial aparatur negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan sinergitas media sosial aparatur negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat untuk dunia akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan Ilmu Kebijakan Pembangunan, khususnya terkait dengan perkembangan studi tentang implementasi kebijakan dalam ruang lingkup yang lebih luas dimasa yang akan datang.

b. Manfaat untuk dunia praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam rangka mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan sinergitas media sosial aparatur negara dalam hal ini Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 58 Tahun 2017, dirubah dengan Kepmenko Polhukam Nomor 10 Tahun 2018 serta Kepmenko Polhukam Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tim Sinergi Media Sosial Aparatur Negara dilihat dari aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian analisa data hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai alternatif jawaban atas fokus permasalahan dan pertanyaan penelitian.

Secara umum penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor-faktor berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh dalam implementasi kebijakan sinergitas media sosial aparatur negara walaupun belum berjalan secara optimal. Masih adanya kendala yang terjadi pada implementasi kebijakan sinergitas media sosial media sosial aparatur negara di Kemenko Polhukam.

Adapun hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Komunikasi

Suatu kebijakan sebelum diimplementasikan harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada semua pihak yang akan melaksanakan kebijakan dan yang akan dijadikan objek daripada kebijakan tersebut. Begitu pula halnya kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara di Kemenko Polhukam sebelum diimplementasikan harus dilakukan sosialisasi kepada pelaksana dan pegawai sebagai sasaran kebijakan secara jelas dan intensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara di Kemenko Polhukam belum berjalan dengan optimal hal ini dilihat dari kenyataannya bahwa dalam hal bagaimana mengerahkan aparatur negara dalam mengkonter informasi negative/ujaran kebencian/hoax belum optimal, bahkan masih ada aparatur sendiri yang sering membuat narasi negatif kepada pemerintah baik melalui whatshaap ataupun facebook, sehingga faktor komunikasi berpengaruh dalam implementasi kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara di Kemenko Polhukam.

2. Aspek Sumber Daya

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sumberdaya memegang peranan penting dan menentukan keberhasilan kebijakan tersebut, oleh karena itu dalam mengimplementasikan kebijakan harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, sarana dan prasarana yang memadai begitupula dengan dukungan anggaran yang disediakan memadai. Tidak terkecuali dalam mengimplementasikan kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara di Kemenko Polhukam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sumberdaya dalam implementasi kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara di Kemenko Polhukam belum berjalan dengan optimal hal ini berdasarkan bawha sumber daya peralatan dan anggaran masih belum ada dimana

peralatan masih menggunakan fasilitas anggota Siman dan anggaran masing menggunakan anggaran pada Deputi Bidkoor Komunikasi dan Aparatur Kemenko Polhukam. Dengan demikian faktor sumberdaya berpengaruh terhadap mengimplementasikan kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara di Kemenko Polhukam.

3. Disposisi

Suatu kebijakan akan berhasil dengan baik dalam implementasinya apabila didukung oleh personel pelaksana, perilaku pelaksana yang positif dan sesuai dengan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan serta komitmen pelaksana dalam bekerja sangat tinggi. Demikian pula dengan implementasi kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara di Kemenko Polhukam akan berhasil dengan baik dalam implementasinya jika didukung oleh pelaksana, komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor disposisi dalam implementasi kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara di Kemenko Polhukam menunjukkan belum berjalan dengan optimal hal ini didasarkan bahwa komitmen dari para pelaksana kebijakan masih kurang hal ini sesuai dengan pelaksanaan dilapangan baru sedikit aparatur yang melakukan konter terhadap informasi negative/ujaran kebencian/hoax. Dengan demikian faktor disposisi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara di Kemenko Polhukam.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan memegang peranan yang sangat penting, karena berkaitan dengan prosedur, sistem kerja, pembagian kerja, wewenang dan koordinasi antar instansi. Tidak bedanya dengan implementasi kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara di Kemenko Polhukam khususnya dalam koordinasi antar instansi harus dilakukan dengan baik.

Memperhatikan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara di Kemenko Polhukam menunjukkan belum berjalan dengan optimal hal ini didasarkan bahwa koordinasi dalam rangka menangani suatu masalah memerlukan waktu karena dilaksanakan melalui rapat koordinasi dimana keanggotan tim terdiri dari K/L lain, sehingga menjadi kendala waktu dalam mengambil keputusan yang dibutuhkan secara cepat, sehingga faktor struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara di Kemenko Polhukam..

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis berusaha memberikan pertimbangan saran, di antaranya adalah :

1. Tim Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara agar tetap melaksanakan sosialisasi supaya aparatur negara bisa mengetahui

pentingnya peranan dari mereka dalam membendung informasi negative/ujaran kebencian/hoax yang beredar di media sosial.

2. Deputi Bidkoor Komunikasi dan Aparatur Kemenko Polhukam sebagai *Leading Sector* agar menyusun kebutuhan anggaran Tim Sinergitas Media Sosial agar bisa diakomodir anggarannya dan memintakan sarana dan prasarana kepada Sesmenko Polhukam bagi tim sinergitas media sosial aparatur Negara berupa ruang sekretariat yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai
3. Tim Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara agar membuat aturan terkait aparatur negara supaya memberikan konter terhadap berita negatif, hoax dengan menshare/like berita/meme yang dikeluarkan oleh Tim Siman/Instansi Pemerintah untuk menangkal berita negatif/hoax beredar.
4. Tim Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara dalam berkoordinasi menangani suatu masalah agar menggunakan teknologi virtual tidak harus rapat koordinasi secara fisik guna mempercepat pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Z. (2004). *Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking: an Introduction*. Connecticut, United States of America: Stamford, CT: Cengage Learning.
- Dunn, W. (2003). *Public Policy Analisys : An Introduction*. Edisi ke-2. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall., A. Simon & Schuster Company. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.
- Islamy, I. (2007). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2005), Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- LAN. (2004). *SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia)*. Jakarta: Bagian Humas LAN RI.
- Meleong, Lexy J (2006), *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mustopadidjaja. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN.
- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta (2002). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir STIA LAN* : Jakarta
- Putra, F. (2001). *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik* (Cetakan Pertama). Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Universitas Sunan Giri Surabaya.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2006). *Handbook of Public Policy*. London, United Kingdom: Sage Publications Ltd.
- Sabartien, P. (1983). *The Implementation Of Public Policy : A Frame Work of Analysis* : University of California.
- Subarsono, A. (2006). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, (2003), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendeklasian Tanggungjawab kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat, DKI
- Thoha, Miftah (2002), *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wahab, S. A. (2007). *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

B. JURNAL

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-11
- Amedie, J (2015) The Impact of Social Media on Society, Santa Clara University
- Haqqani, I. (2020). *Pemanfaatan Media Sosial oleh Bhabinkamtibmas Guna Mengantisipasi Penyebaran Hoax Pemilu 2019 di Polres Banyumas.* Police Studies Review 4(1). Januari 2020 : 297-372
- Lampe, C. (2011) *Inherent barriers to the use of social media for public policy informatics.* The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Volume 16(1), 2011, article 6
- Lope, M. (2019). *Akibat Hukum Bagi Pelaku Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Perbuatan Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial.* Lex Et Societatis Vol. VII/No. 8/Ags/2019
- Mwangi, C. (2018) Media Influence on Public Policy in Kenya: The Case of Illicit Brew Consumption. Sage Open April-June 2018
- Obar, A. (2015) Social Media Definition and the Governance Challenge : An Introduction to the Special Issue. Michigan State University
- Rhamdani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1-12.
- Rahadi, D. (2017). Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 58-70.
- Suryadharma (2017). *Faktor Penerimaan Media Sosial Instansi Pemerintah di Indonesia.* *Journal of Information Technology*, Vol 2, No 2, September 2017: 1-10
- Yan Zhang, Tianyu Li, Kaining Chen, Kairan Dai (2018). *A Review of the Media Impact on Public Policy Process in China: the Failure of*

"Traditional Media Framework" and the Absence of "Social Media Framework". Jurnal Publik, Vol.16 No. 31:129

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Kepmenko Polhukam Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tim Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara

Kepmenko Polhukam Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tim Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara

Kepmenko Polhukam Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tim Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di lingkungan Lembaga

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Standard operating procedure (SOP)*

Peraturan Menpan dan RB Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah

D. WBSITE

<https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/> diakses, 10 April 2019

- <https://news.detik.com/berita/d-4532182/kominfo-identifikasi-486-hoax-sepanjang-april-2019-209-terkait-politik> diakses 2 Mei 2019
- <http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/04/Statistik-PNS-per-Desember-2018-Tenaga-Guru-dan-Kesehatan-Menjadi-Fokus-Pemenuhan-Kebutuhan-ASN.pdf> di akses 2 Mei 2019
- <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4032678/undip-segera-putuskan-sanksi-untuk-guru-besar-diduga-anti-nkri> di akses Rabu, 19 Juni 2019
- <https://news.okezone.com/read/2019/05/28/337/2061293/sebar-hoax-di-medsos ASN aceh barat daya ditangkap polisi> diakses Rabu, 19 Juni 2019
- <https://bangka.tribunnews.com/2018/03/07/oknum ASN diduga terlibat berita hoax belum diperiksa inspektorat belum bisa berkomentar> di akses Rabu, 19 Juni 2019
- <https://news.okezone.com/read/2019/03/02/525/2025021/diduga-sebar-hoax-soal-pilpres-2 ASN purwakarta terancam dipecat> di akses Rabu, 19 Juni 2019
- <https://www.kompasiana.com/mariarosarikrisdyahayu6905/5b981cd312ae9437ca69f295/sejarah-internet-dan-perkembangan-media-sosial-di-indonesia-dari-friendster-hingga-snapchat?page=all> diakses 7 Agustus 2019
- https://web.facebook.com/bsoenaryo?_rdc=1&_rdr diakses 30 Agustus 2019
- https://www.researchgate.net/publication/333387578_PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGAHAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN diakses 25 Maret 2020